

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327110969>

MOTIF, PERSEPSI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA

Article · August 2018

CITATIONS

0

READS

142

1 author:



Nurmi Nonci

Bosowa University

34 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

NOSARARA

JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL

VOLUME 1, No 1, OKTOBER 2015

PENGEMBANGAN MAKET PUSAT-PUSAT PEMERINTAHAN KERAJAAN MATARAM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH

(HY. Agus Murdiyastomo dan Aman)

MOTIF, PERSEPSI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA

(Harifuddin Halim, Syamsul Bachri, dan Nurmi Nonci)

BUDAYA POLITIK PATRON-KLIEN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI

(Hasdin)

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ADVOKASI PADA SISWA KELAS XI IPS / IIS 1 DI SMA NEGERI 2 PASANGKAYU

(Hasan dan Mulyana)

KELAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT DI DESA TORUE

(Nuraedah)

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI DAN PERTUKARAN POLITIK

(Rasyidah Zainuddin, Abdul Malik Iskandar, dan Maksud Hakim)

PERMASALAHAN PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI 1 TORUE

(Suyuti dan Niluh Widarti)

PEREMPUAN BERPOLITIK: SEJARAH PEREMPUAN DPRD KABUPATEN TOLI TOLI (1971-2009)

(Windayanti dan Nuraedah)



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tadulako



NOSARARA

JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL

Kapita Selekta Pendidikan dan Ilmu Sosial

VOL. 1 No. 1 OKTOBER 2015

- | | |
|---|--|
| Agus Murdiyastomo dan
Amran | Pengembangan Maket Pusat-Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram
Islam Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah |
| Haruddin Halim, Syamsul
Bachri, dan Nurmi Nonci | Motif, Persepsi dan Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Gowa |
| Hasbi | Budaya Politik Patron-Klien Pada Pemilihan Kepala Daerah dan
Dampaknya Terhadap Pendidikan Demokrasi |
| Hasan dan Mulyana | Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran
Advokasi Pada Siswa Kelas XI IPS / IIS 1 di SMA Negeri 2 Pasangkayu |
| Nuraedah | Kelas Sosial dalam Masyarakat di Desa Torue |
| Rasyidah Zainuddin, Abdul
Wali Iskandar, Maksud
Hakim | Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi dan
Pertukaran Politik |
| Syaiful dan Niluh Widarti | Permasalahan Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri I Torue |
| Widayanti Dan Nuraedah | Perempuan Berpolitik: Sejarah Perempuan DPRD Kabupaten Tolitoli
(1971-2009) |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

NOSARARA

JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA JURNAL
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2015

PENANGGUNGJAWAB

Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Tadulako
(Drs. Charles Kapile, M.Hum)
Koordinator Prodi Pendi. Sejarah FKIP Universitas Tadulako
(Dra. Hj. Junarti, M.Hum)

REDAKTUR

Dr. Nuraedah, S.Pd.,M.Pd

PENYUNTING / EDITOR

Prof. Dr. H. Juraid, M.Hum (Universitas Tadulako)
Prof. Dr. H. Dadang Supardan, M.Pd (UPI Bandung)
Dr. Aman, M.Pd (UNY Yogyakarta)

DESAIN GRAFIS

Abdul Rahman, S.Pd.,M.Pd

FOTOGRAFER

Pahriadi, S.Pd

SEKRETARIAT

Erwin Rasyid, S.Pd

ALAMAT SEKRETARIAT

Kantor Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FKIP - Universitas Tadulako

Jl. Soekarno - Hatta Km. 9 Tondo Palu Sulawesi Tengah

Email : nosarara.untad@yahoo.co.id

Kontak Person. 085242858217 - 085298878914

NOSARARA

JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL

Info Jurnal Nosarara

Jurnal Nosarara terbitan Volume 1, No. 1 bertemakan "Kapita Selekta Pendidikan dan Ilmu Sosial". Tema ini diangkat mengingat jurnal Nosarara baru pertama kalinya melakukan terbitan, untuk mempercepat proses penerbitan sebagai awal terangkumnya artikel-artikel penulis dari berbagai daerah di Indonesia, maka tema yang diajukan pertama kalinya adalah tema umum yang berhubungan dengan kajian Pendidikan dan Ilmu Sosial, sebagai kesempatan terbitan pertama Tim Pengelola Jurnal mengadakan review artikel yang layak diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel yang terpilih terdiri atas 8 (delapan) artikel dari beberapa Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Timur.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

HY. Agus Murdiyastomo dan Aman	Pengembangan Maket Pusat-Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah	1- 28
Harifuddin Halim, Syamsul Bachri, dan Nurmi Nonci	Motif, Persepsi dan Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Gowa	29 - 40
Hasdin	Budaya Politik Patron-Klien Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Demokrasi	41 - 50
Hasan dan Mulyana	Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran Advokasi Pada Siswa Kelas XI IPS / IIS 1 di SMA Negeri 2 Pasangkayu	51 - 63
Nuraedah	Kelas Sosial dalam Masyarakat di Desa Torue	64 - 72
Rasyidah Zainuddin, Abdul Malik Iskandar, dan Maksud Hakim	Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi dan Pertukaran Politik	73 - 83
Suyuti dan Niluh Widarti	Permasalahan Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri I Torue	84 - 94
Windayanti Dan Nuraedah	Perempuan Berpolitik: Sejarah Perempuan DPRD Kabupaten Tolitoli (1971-2009)	95-109

Redaksi Jurnal Nosarara menerima tulisan dari akademisi dalam bentuk soft file. Tulisan tersebut dapat dikirim melalui email ke nosarara.untad@yahoo.co.id. Redaktur berhak mengubah tulisan tanpa mengubah isi.

Edisi Selanjutnya akan mengangkat tema "Seputar Pendidikan di Indonesia dan Kajian Sulawesi". Kunjungi nosarara.untad@yahoo.co.id

Kritik dan saran dapat dikirim melalui email ke nosarara.untad@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan, di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu berperan dalam persaingan global, sebagai generasi penerus bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia. Upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan sentral dan strategis. Hal ini ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab II pasal 3 yakni Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melalui jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial NOSARARA inilah kita mencoba mewujudkan kemampuan- kemampuan manusia sesuai undang- undang yang telah dijelaskan diatas, maka pada penerbitan pertama ini diberi tema Kapita Selekta Pendidikan dan Ilmu Sosial, yang mana tulisan dapat dilihat pada beberapa sinopsis jurnal dibawah ini.

HY. Agus Murdiyastomo dan Aman mengangkat judul “Pengembangan Maket Pusat-Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah”.

Tulisan Harifuddin Halim, Syamsul Bachri, Nurmi NoncitentangMotif, Persepsi dan Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Gowa, yang ingin mengungkapkan persepsi dan motif serta model komunikasi yang berlangsung di DPRD Kabupaten Gowa, penulis menyimpulkan bahwa; (1) persepsi dan motif anggota DPRD Kabupaten Gowa berkaitan dengan “menjadi legislator untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat; dan sebagai bentuk aktualisasi diri, (2) Komunikasi politik di DPRD Kabupaten Gowa bersifat transaksional dan interaksional. Keduanya silih berganti berlangsung tergantung konteks sosial-politiknya.

Tulisan Hasdin terkait Budaya Politik Patron-Klien pada Pemilihan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Demokrasi, menguraikan bahwa salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan *patronage*, atau pola hubungan *patron-client*, baik di kalangan penguasa maupun masyarakat. Para calon dan pendukung dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan berbagai cara, salah satunya melalui jaringan patron-klien.

Tulisan Hasan dan Mulyana Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran Advokasi Pada Siswa Kelas IPS/IIS 1 di SMA Negeri 2 Pasangkayu dimana Secara umum model pembelajaran Advokasi (debat) perlu diterapkan dan dikembangkan karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS/IIS 1 di SMA Negeri 2 Pasangkayu. Hendaknya guru memilih dan menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang perkembangan berpikir siswa, sehingga siswa tidak hanya menghayal dan

MOTIF, PERSEPSI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA

Oleh

Harifuddin Halim (athena_lord73@yahoo.com)¹

Syamsul Bachri (sulbahri45@gmail.com)²

Nurmi Nonci (nurminonci@yahoo.com)³

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi dan motif serta model komunikasi yang berlangsung di DPRD. Berlokasi di DPRD Kabupaten Gowa, legislator yang dijadikan sebagai informan berjumlah 6 orang. Data dikumpulkan dari mereka melalui wawancara mendalam tentang tindakan-tindakan mereka dalam berinteraksi sosial serta penafsiran mereka menyangkut status dan peran mereka sebagai anggota dewan. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan formal anggota dewan khususnya informan baik di dalam kegiatan resmi seperti rapat maupun kegiatan lainnya. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan induktif kualitatif atau interpretatif. Berdasarkan analisis data tersebut, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) persepsi dan motif anggota DPRD Kabupaten Gowa berkaitan dengan dua hal penting, yaitu: mereka menjadi legislator untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat; dan sebagai bentuk aktualisasi diri. (2) Komunikasi politik di DPRD Kabupaten Gowa bersifat transaksional dan interaksional. Keduanya silih berganti berlangsung tergantung konteks sosial-politiknya.

Kata Kunci: *Interaksi, Politik, Komunikasi, DPRD,*

¹ Dosen Tetap di UVRI Makassar

² Dosen Tetap di Universitas 45 Makassar

³ Dosen Tetap di Universitas 45 Makassar

Abstract

This article aims to reveal the perceptions and motives as well as a model of communication that took place in Parliament. Based in Gowa district legislature, legislators who serve as informants amounted to 6 people. Data were collected from them through in-depth interviews about their actions in social interaction as well as their interpretations regarding the status and their role as a board member. In addition, data was also collected through direct observation of the formal activities of board members particularly good informant in official activities such as meetings and other activities. The data obtained are then analyzed using an inductive approach to qualitative or interpretive. Based on analysis of these data, it was concluded the following matters: (1) perceptions and motives of legislators Gowa deals with two important matters, namely: they became legislators to fight for the interests of the community; and as a form of self-actualization. (2) Political communication in Parliament Gowa transactional and interactional. Both alternated lasts depends on socio-political context.

Keywords:*interaction, politics, communications, parliament.*

Pendahuluan

Adaberbagai ragam penafsiran atas motif politik anggota dewan dan bagaimana ia merepresentasikan motifnya melalui impression managemen di pentas politik. Bahwa anggota dewan menjadikan simbol-simbol keanggotaan terutama pakaian yang menjadi simbol dominan dalam merepresentasikan diri sebagai legislator sehingga pakaian itu pulalah menjadi obsesi bagi politisi untuk mengemasnya secara maksimal.

Terdapat juga ragam persepsi terhadap peran politik yang melekat pada diri seorang anggota DPRD. Haltersebut dipengaruhi oleh motif politik yang ditetapkan pada saat maju sebagai calon anggota DPRD. Mereka yang motif politiknya murni, memiliki tindakan dan tanggung jawab tinggi terhadap segala perilaku politik yang ditampilkannya. Ini juga yang menjadi warna dalam komunikasi politik mereka.

Pada sisi lain ada juga politisi mengungkapkan bahwa para legislator di DPRD sebenarnya adalah mereka yang menyuarakan aspirasi individu dan kelompok saja, tapi mereka sangat pandai membungkus motivasi ini dengan tetap mengedepankan bahwa mereka menyuarakan aspirasi masyarakat. Kepandaian inilah yang terkait dengan kemampuan legislator dalam mempresentasikan diri di arena politik dan mengelola kesan atas penampilan mereka tadi.

Komunikasi politik menurut Muller (1973:73) adalah hasil yang bersifat politik apabila mereka menekankan pada hasil. Plano (1989:24) melihat bahwa “komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik.”

Menurut Suwardi (1997:12): “Dalam arti sempit komunikasi politik adalah: “setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan”.

Bahkan masih terdapat definisi lain yang dapat digolongkan sebagai batasan komunikasi politik dalam arti sempit yaitu “Suatu komunikasi yang dapat dikatakan memiliki nilai atau bobot politik bila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik yang mengatur tingkah laku manusia di bawah pertentangan (Soewardi, 1995:6).

Menurut Elihu Katz (Harsono, 1997: 17) ada dua tipe politikus yaitu: (1) wakil rakyat atau partisan. Ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok. (2) *Ideologi* atau *policy formulator*, memperjuangkan

nilai-nilai seseorang di dalam memperjuangkan suatu perubahan pembaharuan secara revolusioner.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini menitik-fokuskan pada: (1) pandangan informan tentang status mereka sebagai 'legislator'. (2) bentuk-bentuk komunikasi (politik) yang dilakukan oleh informan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan tahun 2011/2012 setelah kepengurusan baru berlangsung 2,5 tahun untuk periode 2009-2014 di Kantor DPRD Kabupaten Gowa. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi-kasus terhadap 4 orang legislator sebagai informan. Mereka dipilih dengan pertimbangan: (1) telah terpilih sebagai legislator untuk yang ke-dua kalinya. (2) proaktif berdiskusi di dalam pertemuan resmi maupun tidak di resmi yang diselenggarakan di DPRD Kabupaten Gowa. (3) banyak melakukan sosialisasi ide di masyarakat sebagai bentuk komunikasi politik.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Kepada mereka diajukan pertanyaan tentang: pandangan mereka terhadap status dan peran sebagai anggota DPRD; apa saja yang mereka lakukan untuk menunjukkan bila dirinya adalah legislator yang secara sosial politik berbeda dengan masyarakat awam; simbol-simbol apa saja yang selalu mereka

tunjukkan sebagai bentuk perbedaan tersebut. Selain itu dilakukan pengamatan terhadap penampilan mereka, seperti: cara berpakaian, gagasan atau ide yang mereka sampaikan ketika rapat maupun dalam keadaan santai – memberi solusi atau mengkritik- di tempat mana saja mereka sering melakukan sosialisasi ide.

Analisis data dilakukan dengan menghubungkan data hasil wawancara mendalam dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Lalu, dilakukan klasifikasi berdasarkan tujuan penulisan dan terakhir dilakukan dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi dan Motif Informan

Kebanyakan anggota DPRD menganggap bahwa mereka semata-mata hanya mencari popularitas dan kekuasaan saja dengan menjadi politisi. Bahkan sebagian menganggap kebanyakan politisi mengalami *culture shock*. Bagaimana tidak, jika mereka yang sebagian besar selama ini tidak dikenal rakyat tiba-tiba harus berbicara di depan banyak orang. Pembicaraanpun tidak berhenti di sekitar pembicaraan politik tapi mereka harus berbicara tentang ekonomi, budaya dan sosial yang selama ini mungkin tidak pernah mereka baca sekalipun. Dengan demikian, mereka juga harus bergeser tempat makan yang biasanya di warung atau di rumah ke restoran di hotel, dari tidak punya

mobil menjadi bermobil, dari jenis mobil biasa menjadi mobil mewah.

Sebagian besar informan anggota DPRD sangat percaya diri menganggap bahwa kehadiran mereka di DPRD semata-mata adalah untuk lebih fokus menyuarakan aspirasi masyarakat karena mereka dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Tetapi beberapa informan lainnya menganggap bahwa para politisi hanya mencari popularitas dan status sosial semata melalui simbol-simbol keanggotaan mereka di DPRD. Namun jika dianggap bahwa perjuangan mereka di Parlemen belum atau tidak maksimal menurut mereka hal itu karena masih banyaknya perbedaan pendapat antara rekan mereka sesama politisi yang masih harus berkomitmen terhadap kepentingan kelompok partai mereka.

Sebagian besar anggota DPRD memang cukup pandai mengelola kesan atas penampilan mereka terutama secara fisik. Simbol keanggotaan yang nyaris tidak pernah dilepaskan serta gaya bicara yang dikemas sedemikian rupa menjadikan sebagian dari mereka nampak seperti sangat bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ternyata terdapat perbedaan motif antara politisi yang satu dengan lainnya tapi dikemas dalam bahasa yang sama, yaitu meneruskan bakat berorganisasi dalam bentuk aktualisasi diri dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebuah motif yang

nampak sangat ideal jika dibandingkan dengan sepak terjang politisi yang disorot dalam berbagai tingkatan bahwa kebanyakan hanya memiliki motif kekuasaan dan popularitas semata.

Kategori motif ini menjadi menarik manakala disandingkan dengan bagaimana kemudian politisi mengelola kesan atas penampilan politiknya di pentas politik, namun motif ini hanya dapat diungkap oleh pelakunya karena itu agak sulit mendeteksi kebenaran dari motif tadi. Hanya saja proses politik di DPRD dapat menjadi ajang yang menarik untuk mengamati apakah motif yang diungkapkan dalam bahasa ideal tadi dapat diterapkan ketika ia berhadapan dengan konstituennya atau ketika ia memperjuangkan suara konstituen itu baik di fraksi, di komisi maupun di paripurna. serta dalam pertemuan politik lain yang digelar dengan mitra kerjanya di arena politik DPRD.

Komunikasi politik di DPRD sekarang memang lebih terbuka, ada transparansi dalam pesan politik dan para pelaku komunikasi politik juga lebih bervariasi. Kalau dulu wacana politik lebih didominasi oleh wacana politik resmi sedangkan wacana politik yang kritis tidak akan terakomodasi dalam sarana komunikasi seperti di media

Melalui keterbukaan itu pula politisi akan lebih leluasa mewujudkan motivasinya, mereka dapat mengemas motif politiknya dengan membungkusnya melalui sejumlah

pementasan politik yang memukau dan santun, namun bisa jadi menghebohkan. Namun pernyataan pribadi politisi yang hampir seluruhnya menyatakan bahwa motif utama ke Parlemen adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata ditanggapi berbeda oleh para pengamat politik dan aktivis yang menjadi informan penelitian ini. Tetapi sebagai politisi mereka mengungkapkan motif itu dengan berbagai argumen.

Penulis memiliki banyak kesempatan menyaksikan sejumlah rapat dan kegiatan lain yang dihadiri oleh para politisi anggota DPRD. Penulis agak gamang menyaksikan apakah kebanyakan politisi memang menyuarakan aspirasi konstituen, masyarakat, partai atau individunya sendiri. Tetapi menurut NTS (35 Tahun) yang mengamati kiprah anggota DPRD Kabupaten Gowa dan merasakan bagaimana para politisi muda memang lebih mampu menampilkan kesan yang memukau hari demi hari. Meski hal itu Lebih dimungkinkan oleh suasana politik yang juga memang telah berubah.

Inilah yang diungkapkan NTS :

“Kebanyakan anggota DPRD sekarang ini sangat tergantung dalam peran politik formal bahwa mereka mempunyai tema yang berbeda di ruang publik dan yang di legislatif...paling tidak dengan pengalaman mereka mengenai realitas politik dan konsep politik tertentu akhirnya menjadi *learning process* selama di legislatif. Misalnya ARI saya lihat cukup menunjukkan kompetensi sebagai politisi muda terlepas dari

background politik mereka, NSAL, RML, telah meningkatkan peran politik mereka secara aktif dibandingkan masa lalu.” (Wawancara, 3 Januari 2012)

Sebagai seorang politisi yang mempunyai latar belakang pengusaha, dalam pengamatan penulis YSF juga merupakan seorang politisi yang dalam kesehariannya selalu berusaha menggunakan bahasa politik yang santun. Ia juga merupakan seorang politisi yang melihat adanya korelasi antara perilaku politik politisi lain dengan model perilaku yang ditampilkan dalam keseharian.

Selain YSF, seorang politisi lain di DPRD juga mengungkapkan motif politiknya masuk ke Parlemen. Dialah RML, politisi PDIP yang seringkali garang dan langsung ke pokok persoalan ketika berkomunikasi. Gaya bicaranya cenderung berapi-api apalagi jika menyangkut idealisme dan paham nasionalis yang begitu ia bangga-banggakan. Kekaguman pada Bung Karno membuat ia berulang kali menyatakan bahwa tokoh yang paling ia kagumi adalah Bung Karno. Inilah yang diungkapkan oleh RML:

“Menjadi politisi adalah cita-cita saya sejak dulu, tetapi saya tidak suka dan selalu menghindari politik praktis, saya lebih cocok sebagai negarawan. Sehingga saya melakukan segala sesuatu berdasarkan hati nurani saya, seperti kata Bung Karno: " Hati nurani itu pada dasarnya adalah satu.” (Wawancara, 21 September 2011)

Uraian di atas menggambarkan persepsi para politisi yang menganggap

bahwa upaya keterwakilan haruslah dilakukan dengan berbagai cara dan mekanisme sehingga mereka bisa di dengar, terlepas apakah mereka dianggap tidak melakukan pengelolaan kesan terhadap diri mereka dengan baik sesuai dengan pencitraan yang melekat kepada mereka sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Inilah yang terjadi di DPRD, bahwa orang-orang di dalamnya saling mengenal dan berkomunikasi secara tidak terbatas, terorganisasi, meski komposisi pelaku komunikasi tetap namun mempunyai kepemimpinan dan perasaan identitas terutama identitas kepartaian, dalam proses komunikasi politik yang dijalankan tetap menuntut mekanisme umpan balik yang rasional, proporsional dan demokratis. Oleh karena itulah maka para legislator di DPRD melakukan proses komunikasi politik, mereka berupaya menampilkan sosok dirinya dalam berbagai event.

Namun demikian, sepanjang pengamatan peneliti, politisi yang memainkan peran politiknya kebanyakan memang melakukan pengelolaan kesan yang cukup memadai. Terlepas dari kesan bahwa mereka diam dan bungkam dalam suatu sesi rapat, tidak berarti bahwa mereka menyembunyikan ketidakberanian mereka. Sejumlah legislator nampak sekali ketika berbicara mengemas kalimat demi kalimat dengan cara yang runtun fasih dan jauh dari kesan garang. Dilihat dari segi penampilan pun mereka sangat rapi dan

bersih. Pada sisi lain, anggota DPRD lainnya seperti RML dan PTL, meskipun berusaha berbicara runtun, namun di tengah pembicaraan cenderung meninggi.

Melihat bagaimana politisi melakukan proses pencitraandi wilayah depan dan wilayah belakang pentas politik, seperti menyaksikan dua wajah dari dua pementasan saja. Tidak jarang ketika keluar dari ruang sidang beberapa politisi yang sebelumnya peneliti amati ketika berada di ruang sidang tidak memperlihatkan aktivitas apapun kecuali hanya mendengar dan diam, tetapi ketika rapat selesai digelar, ia malah yang banyak mengeluarkan komentar dan pernyataan atas hasil rapat ataupun materi rapat yang baru di gelar. Gaya bicaranya seperti juru kampanye, ia yang tadinya terkantuk-kantuk di ruangan, tetapi tiba-tiba menjadi sangat memahami materi rapat yang baru di gelar di komisinya. Gambaran tersebut hanya satu sisi saja dari banyak wajah dan model perilaku politisi yang begitu beragam di pentas politik DPRD.

Dengan demikian, meskipun masing-masing legislator menampilkan kekhasan perilaku tersendiri di pentas politik DPRD, paling tidak hal tersebut dapat mengantarkan pada satu tindakan untuk mencoba melihat dan memahami seperti apa sebenarnya legislator tersebut melakonkan peran politiknya dengan berpedoman pada model komunikasi politik yang lazim diberlakukan di DPRD, atukah kekhasan perilaku itu malah tidak ada kaitan sama sekali dengan

model komunikasi politik yang memang berlaku dan terjadi di DPRD, sehingga masing-masing politisi dapat saja melakukan peran politik dengan gaya, atribut dan pemahaman politiknya masing-masing. Padahal jika ada model komunikasi politik yang dapat diterapkan secara konsisten dan politisi dapat mewakili kepentingan rakyat yang diwakili secara konsisten pula, maka fungsi keterwakilan mereka tentu akan jauh menjadi lebih efektif. Model komunikasi inilah yang seharusnya menjadi rujukan sehingga fungsi keterwakilan dapat dijalankan secara baik, disuarakan secara benar dan menghasilkan keputusan yang baik dan benar pula sejalan sesuai harapan rakyat.

Komunikasi Politik Legislator

Kemampuan berkomunikasi politik bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, banyak kasus yang terjadi karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi justru menimbulkan konflik. Belum lagi kasus yang melibatkan kategori lain dari pelaku komunikasi politik yang datang ke DPRD. Jika itu terjadi pada politisi di DPRD, mereka tidak menunjukkan progres dari kompetensi sebagai politisi maka akan menyangkut integritas di mata publik dan tetap seperti itu sampai akhir keanggotaannya, bisa ditebak bahwa, sulit bagi mereka untuk kembali muncul sebagai wakil terpilih di parlemen. Mereka gagal melakukan komunikasi politik dalam ranah yang sangat terbatas sekalipun.

Pada beberapa kejadian, seperti saat sejumlah masyarakat datang ke DPRD mengadakan rapat dengar pendapat. Bahkan kehadiran beberapa pengunjung rasa yang menyuarakan agenda dan kasus yang tengah aktual ditangani oleh anggota DPRD pun selalu dapat diterima oleh para anggota dewan meskipun sering terkesan lambat. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran anggota DPRD di kantor pada saat itu terutama mereka yang hari itu sudah ditugaskan sebagai Tim Aspirasi. NTS menjelaskan:

“...paling sering terasa repotnya ketika ada aduan masyarakat yang datang dan Tim Aspirasi lagi keluar. Maka dalam kondisi seperti itu, saya minta warga untuk sabar sejenak dan memintanya masuk istirahat di ruang paripurna sambil disediakan mereka air minum. Lalu saya hubungi siapapun anggota DPRD yang sesuai bidang komisinya meskipun tidak bertugas hari itu, tapi saya memintanya untuk segera datang dan kebetulan rumah anggota DPRD rata-rata dekat”. (Wawancara, 3 Januari 2012)

YSF politisi partai PDK memiliki tanggapan terhadap para pengunjung rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Ia mengatakan :

"Sekarang ini ada banyak kasus yang ditanggung oleh kepentingan politik oknum tertentu sehingga tidak lagi murni memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka, tidak mengherankan apabila terjadi kecenderungan perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh para pengunjung rasa yang datang ke

legislatif." (Wawancara, 12 Desember 2011).

Anggapan YSF bermakna bahwa ketidaksiapan para anggota dewan yang terhormat untuk menerima kehadiran pengunjung rasa adalah karena klasifikasi dan pemahaman yang berbeda antara mereka yang datang ke DPRD dengan mereka yang diharapkan menerima kehadiran para pengunjung rasa tadi. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD belum maksimal sehingga berpengaruh pada kualitas komitmen dan integritas mereka.

Inilah yang menimbulkan spekulasi anggapan yang juga beragam dari berbagai pihak yang mengamati perilaku anggota DPRD serta mereka yang memberi apresiasi terhadap berbagai peran yang dimainkan oleh legislator dan mereka bukan legislator, bahwa para politisi sebenarnya hanya ingin mencari popularitas saja dari peran politik yang mereka mainkan di arena politik. Seperti yang di ungkapkan oleh PTL:

"Institusi DPRD merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap permasalahan yang berkembang. Di DPRD ada berbagai forum seperti komisi dan fraksi, bisa disampaikan secara langsung dan tidak langsung, bisa melalui individu, melalui kelompok dan bisa dengan unjuk rasa. Itu adalah salah satu mekanisme untuk memecahkan masalah di masyarakat. Semakin mampu DPRD menyerap dan menyelesaikan masalah tersebut maka semakin besar

fungsinya dalam kerangka pembangunan komunikasi politik dengan masyarakat". (Wawancara, 5 Agustus 2011)

Jadi, dalam konteks menyelesaikan masalah di masyarakat itulah komunikasi politik dilakukan terutama dalam rangka agregasi kepentingan masyarakat dengan mekanisme komunikasi politik yang dilakukan di DPRD. Tetapi pada sisi lain komunikasi politik juga dapat dilakukan politisi dengan turun ke masyarakat. DPRD juga memerlukan dinamika masyarakat. Dengan demikian DPRD harus sering turun ke masyarakat, mencari, mendengarkan dan menampung aspirasi, membawanya ke DPRD untuk dirumuskan melalui kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, terdapat hubungan yang tidak bisa dilepaskan antara posisi terwakil dengan mereka yang diwakili. Persoalannya adalah jika para politisi tidak memahami fungsi keterwakilan itu sehingga yang muncul adalah bukan bagaimana mewujudkan sinkronisasi antara motif politisi dengan fungsi keterwakilan yang mereka jalankan, melainkan sekedar menggelar rutinitas pertukaran pesan politik yang satu dengan pesan politik lainnya dalam setting komunikasi politik di DPRD.

Jika komunikasi politik diinterpretasikan sebagai sebuah cara, mekanisme dan proses seperti yang disinyalir oleh PTL dan merupakan upaya yang seharusnya inisiatifnya lebih banyak datang oleh DPRD, apa yang terjadi kemudian

bahwa setiap kasus terjadi di masyarakat dan melibatkan bahkan menimbulkan kerugian di masyarakat nampaknya lebih banyak masyarakat yang menggagas inisiatif itu untuk diteriakan kepada para wakilnya. Dengan demikian, malah seringkali terjadi benturan yang merupakan efek mengapa pesan-pesan politik yang dikomunikasikan itu menjadi bias, menjadi salah dipersepsikan menjadi masalah yang menimbulkan makna yang berbeda.

Dalam konteks kasus semacam itu ada juga sebagian kecil politisi tidak hanya yang menjadi informan penelitian ini yang ngotot melakukan komunikasi politik yang dianggapnya menyuarkan aspirasi masyarakatnya. Tetapi cara dan mekanisme penyampaian pesan itu seolah-olah ingin memperlihatkan dominasi dirinya sebagai wakil rakyat yang berkuasa, sehingga ia harus menaiki meja rapat, menggebrak dan menyerobot mikrofon untuk bisa bersuara dalam forum rapat.

Ketika itu terjadi, maka PTL mengasumsikan bahwa ada kesalahan peran yang terjadi dan bahkan jika kemudian masyarakat mengasumsikan apa yang dilakukan dengan menyikapinya melalui perilaku yang juga berbeda kemudian mereka menyaksikan politisi berperilaku seperti premanisme maka PTL mengidentifikasikannya sebagai sebuah penyimpangan. Ia menyatakan:

“Biasanya itu terjadi karena mereka kurang menghayati peran dan fungsi

mereka sendiri serta belum memahami aturan yang ada. Kemungkinan penyebabnya adalah yang bersangkutan tidak berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi anggota DPRD. Orang yang cara berpikirnya seperti itu tidak selayaknya duduk di DPRD. Jadi kalau premanisme itu terjadi dikarenakan ngototnya politisi disebabkan karena ketidapahamannya atas peraturan yang ada, maka mereka tidak layak ada di DPRD. Sebab, komunikasi politik di DPRD itu dilakukan dengan mekanisme diplomatik, dengan akal sehat, dengan argumentasi.” (Wawancara, 5 Agustus 2011)

Uraian PTL di atas juga makin mempertegas bahwa anggota DPRD cenderung kurang memiliki komitmen terhadap peran dan tanggung jawabnya terhadap konstituennya. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap eksistensi sebagai anggota DPRD, lalu mempengaruhi tindakan yang harus dilakukan. Artinya, anggota DPRD kurang membaca buku atau membaca informasi setiap saat yang mengakibatkan kurangnya wawasan politik menyangkut pekerjaan mereka di legislatif.

Pentas politik legislatif dimana anggota DPRD melakukan proses belajar politik dan berkomunikasi politik di dalamnya. Bagi mereka yang bisa duduk di DPRD dengan tidak melalui proses rekrutmen yang memadai atau melalui proses rekrutmen dengan kriteria seleksi yang relatif longgar akan belajar dari realitas politik dan konsep politik yang terus

dibicarakan di DPRD, sehingga masing-masing berusaha untuk menunjukkan kompetensi mereka sebagai politisi, terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi politik sekaligus peran politik mereka. Dengan demikian, maka dapatlah dimengerti jika politisi memaknai peran politiknya dalam mengkomunikasikan pesan-pesan politik dengan ragam yang juga berbeda. Selain itu, dapat pula dimengerti jika fenomena konflik dan pertentangan yang terjadi dalam penyampaian pesan-pesan politik di DPRD dapat terjadi dalam konteks apapun baik di pentas depan maupun pentas belakang.

Tidak adanya perbedaan pentas politik dalam persepsi politisi sehingga pentas politik depan maupun pentas belakang tetap menjadi pentas politik di mana mereka menjalankan peran politik apapun. Simbol keterwakilan yang memang sulit mereka lepaskan meski pada waktu itu mereka tidak tengah menjalankan fungsi keterwakilan sekalipun.

Sebenarnya, jika semua dapat mengkomunikasikan dengan baik, idiomnya juga baik, maka tentu tidak akan ada persoalan. Jika tidak, massa yang ada di bawah juga tidak dapat mengartikan dengan baik, maka akan salah pengertian. Oleh karena itu apa yang selama ini dianggap sebagai kekerasan politik adalah segala perbuatan atau tingkah laku dalam mengkomunikasikan pesan-pesan politik yang tidak bersandar pada mekanisme, etika,

budaya dan fungsi keterwakilan maupun kapasitas dan kapabilitas yang seharusnya menjadi patokan komunikator politik dalam menyampaikan pesan politiknya maka untuk memudahkan memberi istilah selama ini itulah yang diidentikan dengan kekerasan politik.

Menurut Ariannie (2010), hasil akhir sebuah politik adalah pertemuan antara kepentingan dan kesepakatan, sehingga komunikasi politik apakah bermuatan konflik atau tidak, sangat tergantung pada semua variabel yang bekerja di dalamnya. Konflik di situ adalah pesannya atau muatannya. Muatan itu datang dari si penyampai pesan. Isi pesannya apakah mengandung kekerasan atau tidak sangat relatif, sangat tergantung pada hubungan si pemberi pesan, isi pesan dan penerimanya.

Nampaknya, tidak ada ruang politik yang sepi dari kompromi sebagai hasil akhir dari politik yang dikomunikasikan, meski pada awalnya dipertentangkan namun pada akhirnya dipertemukan dalam sebuah kepentingan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politiklah yang membangun semua proses pertukaran pesan politik di DPRD dan merangkul mereka yang berasal dari fraksi manapun. Komunikasi jelas adalah suatu proses, selalu ada celah untuk memandang komunikasi sebagai suatu proses. "Proses jelas bukanlah fenomena yang ditandai dengan kausalitas." (Mulyana, 2001: 51)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

Pada dasarnya, masing-masing informan memiliki motif yang membentuk persepsinya tentang seorang legislator. Secara garis besar dibagi dua, yaitu: (a) informan yang menganggap bahwa seorang legislator harus memperjuangkan kepentingan rakyat karena dipilih oleh mereka. Motifnya adalah niat untuk memajukan masyarakat. (b) informan yang menganggap bahwa menjadi legislator merupakan bentuk aktualisasi diri. Motifnya bisa bersifat prestasi dan prestisius yang hanya bisa dilakukan ketika menjadi legislator.

Komunikasi politik yang berlangsung di DPRD Kabupaten Gowa sangat kontekstual antara transaksional dengan interaksional. Komunikasi politik transaksional memang dominan terjadi pada sebuah lembaga politik karena adanya 'interest' dan 'power sharing'. Komunikasi politik interaksional sifatnya lebih umum terjadi dalam keseharian legislator.

Daftar Pustaka

Ariannie, Lely. (2010). Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Bandung: Widya Padjajaran.

Mueller, J. E. (1973). *War presidents and public opinion*. New York: Wiley. Hal. 73

Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya a. Hal. 51. Bandung.

Plano, Jack. dkk. (1989). *Kamus Analisa Politik*. PT. Rajawali. Hal. 24. Jakarta

Soewardi, Herman. 1995. *Dalil-Dalil Dalam Ujian Disertasi*. Diklat. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Hal. 6. Bandung.

Suwardi, Harsono. (1997). *Komunikasi Politik*. Diklat. Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal. 12. Jakarta.

Wawancara, NTS. 3 Januari 2012.

Wawancara, RML, 21 September 2011

Wawancara, PTL, 5 Agustus 2011

Wawancara, YSF, 12 Desember 2011